



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN
DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO)

Tahun Sidang : 2012 -2013
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Direktur Utama PT PLN (Persero)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 22 Oktober 2012
Pukul : 16.00 WIB s.d 21.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua : Drs. Effendi Simbolon
Sekretaris : Dra. Dewi Bariliana, M.Psi
Hadir Anggota : 36 dari 51 Anggota Komisi VII DPR-RI
orang izin
Hadir Pemerintah : Direktur Utama PT PLN (Persero) beserta jajarannya.
"Pelaksanaan Fungsi Pengawasan"
Acara : Beban Biaya PLN untuk memenuhi Kebutuhan
Investasi Kelistrikan.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 dibuka pukul 16.00 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Drs. Effendi Simbolon dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) terkait pokok bahasan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, mengenai Beban Biaya PLN untuk memenuhi Kebutuhan Investasi Kelistrikan.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI meminta PT. PLN (Persero) memberikan kajian Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL), agar pengelolaan utangnya mendukung penyediaan kebutuhan listrik,

f

untuk memenuhi target Rasio Elektrifikasi Nasional yang akan dicapai. Serta mengkaji secara komprehensif terkait opsi pembiayaan investasi non_debt diluar subsidi, kemudian menyampaikannya kepada Komisi VII DPR RI termasuk didalamnya benchmarking pengelolaan utang ketengalistrikan dengan Negara lain.

2. Komisi VII DPR RI meminta PT. PLN (Persero) melakukan kajian terhadap regulasi Penetapan Capital Structure Policy dan mekanisme lindung nilai (hedging) agar PT. PLN (Persero) memiliki pijakan tingkat nilai utang sesuai dengan Earnings Before Interest Taxes Depreciation And Amortization (EBITDA) yang proporsional.
3. Komisi VII DPR RI mendukung PT. PLN (Persero) untuk mengambil tindakan yang sesuai dalam rangka menyelesaikan FTP I yang terlambat.

Catatan :

Mengingat adanya persoalan listrik di daerah-daerah yang mengalami krisis listrik, PT. PLN (Persero) diminta segera mengatasi dengan tanggap darurat listrik dan melaksanakannya paling lambat bulan Desember 2012, diantaranya daerah Kalimantan Selatan, Bima dan Banten I (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak).

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 21.45 WIB

Jakarta, 22 Oktober 2012

PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
WAKIL KETUA,



DRS. EFFENDI SIMBOLON